

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2020**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)
KABUPATEN TEBO
2019**

KATA PENGANTAR

Perencanaan pada suatu organisasi merupakan langkah awal untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang ditetapkan. Sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo senantiasa mengarahkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti alur manajemen kepegawaian daerah yang professional.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo adalah pelayanan di bidang kepegawaian kepada aparatur sipil.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020.

Muara Tebo, 2020
Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo



Haryadi, S.Sos. M.Si

Nip. 19680706 199002 1 001

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2018 dan Capaian Renstra BKPSDM	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III. TUJUAN, dan SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3. Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	40
4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 serta Perkiraan Maju Tahun 2021	40
BAB V. PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Perubahan Renja OPD.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Perubahan RKPD. Sedangkan Perubahan RKPD dijadikan dasar penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga kabupaten dalam bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun perubahan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 6).
17. Peraturan Bupati Tebo Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
18. Peraturan Bupati Tebo Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo selama tahun 2020.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 serta Perkiraan Maju Tahun 2021

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 sampai dengan triwulan 2 dan Realisasi Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020 sampai triwulan 2.

Total Anggaran Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 sebesar Rp.5.469.889.232,-. Terdiri dari Biaya Tidak Langsung sebesar Rp. 2.774.833.027,- dan Biaya Langsung sebesar Rp. 2.695.056.205,-.

Seluruh Program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra BKPSDM Kabupaten Tebo s/d
Tahun 2020

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan realisasi kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan kegiatan renja tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					target Renja Perangkat daerah Tahun 2019	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.4.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran	2400 lembar materai 6000 dan 1.200 lembar materai 3000	800 lembar materai 6000 dan 400 materai 3000	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000	100%	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000	1600 lembar materai 6000 dan 800 materai 3000	66,67%
4.01.4.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah periode pembayaran jasa Komunikasi, Air dan Listrik	72 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah periode pembayaran Asuransi pegawai tidak tetap	72 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar asuransinya	24 unit	8	4	4	100%	4 unit	16	66,67%

4.01.4.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	12 unit	0	0	0	0	20	6	
4.01.4.05.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah periode pembayaran honor Aparatur pengelola adm. Keuangan	72 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah tersedianya alat kebersihan kantor	24 paket	8	4	4	100%	4	16	66,67%
4.01.4.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	12 paket	4	2	2	100%	2	8	66,67%
4.01.4.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah periode Tersedianya barang cetak, kop surat BKPSDM, Setda, Bupati Kab. Tebo	72 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah tersedianya komponen instalasi listrik kantor	24 paket	8 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	16 paket	66,67%
4.01.4.05.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Jumlah periode tersedianya bahan bacaan bagi pegawai	72 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.17	Penyediaan Makan dan Minum	jumlah periode Terpenuhinya makan dan minuman kegiatan dan tamu	72 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.01.18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah periode Pelaksanaan rapat-rapat ke luar daerah	72 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%

4.01.4.05.01.01.20	Penyediaan Adminstrasi Teknis Perkantoran	jumlah periode pembayaran tenaga honorer untuk petugas kebersihan kantor, Sopir, Penjaga Malam dan administrasi (6 org)	72 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	0	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%							
4.01.4.05.01.02.	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya perencanaan rehab gedung kantor, tersedia conblok halaman gedung kantor dan tempat parkir	6 paket		3 paket	3 paket	100%	0	4 paket	66,67%
4.01.4.05.01.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung kantor	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	0	2 paket	50%
4.01.4.05.01.02.24	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang rutin dipelihara	roda 2 96 unit roda 4 24 unit	roda2 32 unit roda 4 8 unit	roda2 16 unit roda 4 4 unit	roda2 16 unit roda 4 4 unit	100%	roda2 16 unit roda 4 4 unit	roda2 64 unit roda 4 16 unit	66,67%
		Jumlah periode Pembelian BBM	72	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah periode Terpeliharanya peralatan kerja kantor	72 bln	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%
4.01.4.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	100%							

4.01.4.05.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah tersedianya pakaian dinas	246 stel	70 stell	35 stel	35 stel	100%	0	145 stell	58,94%
4.01.4.05.01.03.05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Tersedianya pakaian batik dan olah raga	504	140	70	70	100%	80	290	57,53%
4.01.4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang memenuhi standar kompetensi	100%							
4.01.4.05.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	75	15	15	15	100%	12	60	80%
4.01.4.05.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	Jumlah Peserta Diklat	1853	162	250	165	66%	0	250	30%
4.01.4.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan	100%							
4.01.4.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	36	12	6	6	100%			50%
2.12.4.05.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Penyelenggaraan pameran investasi	6							
2.12.4.05.01.15.10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pelaksanaan pameran pembangunan Kab. Tebo	6	2	1	1	100%	0	4	67%

4.01.4.05.01.15	Program Pendidikan kedinasan	Persentase peningkatan kualitas ASN								
4.01.4.05.01.15.02	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah peserta diklat pemimpin	78	18	15	15	100%	0	48	61,53%
4.01.4.05.01.30	Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
4.01.4.05.01.30.01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Jumlah pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama melalui seleksi terbuka	61	21	10	7	70%	6	38	62,29%
4.01.4.05.01.30.02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah penerimaan CPNS sesuai formasi.	1399	314	250	195	78%	195	759	54,25%
4.01.4.05.01.30.03	Penempatan PNS	Jumlah penempatan CPNS/PNS pada SKPD sesuai formasi	1149	159	250	165	66%	165	574	49,95%
4.01.4.05.01.30.06	Penyusunan Formasi dan Penataan PNS	Jumlah dokumen formasi yang di susun	6	2	1	1	100%	1	4	67%
4.01.4.05.01.30.04	Penataan sistem kenaikan pangkat.	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan	4655	1368	850	729	86%	900	2997	68,38%
4.01.4.05.01.30.08	Pengelolaan administrasi taspen, cuti bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	Jumlah Dokumen Taspen, Cuti, Bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	21,316	6438	3,547	3405	96%	543	13477	63,22%

4.01.4.05.01.30.16	Pengelolaan administrasi kartu identitas pegawai	Jumlah Kartu Identitas Pegawai yang diproses	2063	423	325	343	106%	350	1116	54,09%
4.01.4.05.01.30.05	Validasi/ Status Kepegawaian Daerah	Persentase validasi kepegawaian	85%	75	80	80	100%	85%	85%	94,11%
4.01.4.05.01.30.14	Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAPK	Persentase terpeliharanya jaringan SAPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.4.05.01.30.26	Penyediaan jasa dan pemeliharaan SAIPKD	Persentase terpeliharanya jaringan SAIPKD	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%
4.01.4.05.01.30.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani	55	10	9	7	78%	9	26	47,27%
4.01.4.05.01.30.17	Penanganan kasus-kasus perceraian PNS	Jumlah rekomendasi izin cerai	72	18	11	5	45%	12	35	48,61%
4.01.4.05.01.30.25	Pelantikan sumpah dan janji PNS	Jumlah CPNS yang mengikuti sumpah dan janji PNS	1160	159	250	9	4%	165	418	36,03%
4.01.4.05.01.30.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan tugas belajar	34	10	7	4	57%	3	21	61,76%
4.01.4.05.01.30.07	Penilaian Kinerja SDM Aparatur	Jumlah dokumen penilaian kinerja	8,315	2683	1,400	1368	98%	1,400	5,451	65,55%
4.01.4.05.01.30.15	Rapat Kerja Kepegawaian	Jumlah peserta rapat kepegawaian	450	150	75	75	100%	0	300	67%

4.05.4.05.01.16	Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi Korpri	Jumlah Kegiatan Organisasi Korpri								
4.05.4.05.01.16.01	Pekan Olahraga Korpri tingkat Provinsi	Jumlah pekan olah raga korpri tingkat propinsi	2					0	1	
4.05.4.05.01.16.03	Pekan olahraga korpri antar SKPD	Jumlah pekan olahraga korpri antar skpd	2	1	0	0	0		1	50%
4.05.4.05.01.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi dan Hukum Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan dan Perda	Jumlah Kegiatan Organisasi Korpri								
4.05.4.05.01.17.01	Sosialisasi Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) KORPRI	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Konsultasi Bantuan Hukum	3	1	0	0	0	0	1	33,33%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). Pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai saat ini BKPSDM Kabupaten Tebo belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang kepegawaian meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar. Namun demikian kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja organisasi.

Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo belum maksimal dalam pelaksanaannya dilapangan dengan berbagai kendala dan masalah mendasar yaitu :

- a. Jumlah aparatur yang terbatas

- b. Sarana dan prasarana yang masih minim
- c. Sumber Daya Aparatur yang masih lemah/ belum professional
- d. Anggaran yang terbatas

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo sesuai dengan tupoksi adalah mengurus administrasi kepegawaian di daerah dengan system dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Bazzeting pegawai
- b. Administrasi kenaikan pangkat
- c. Administrasi kenaikan gaji berkala pegawai
- d. Persyaratan mutasi/ pemindahan pegawai
- e. Pengurusan izin belajar
- f. Pengurusan tugas belajar
- g. Prosedur pengajuan kartu pegawai
- h. Penerbitan kartu suami istri
- i. Administrasi pengajuan cuti
- j. Pemberian penghargaan/reward dan sanksi
- k. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- l. Ujian dinas
- m. Kesejahteraan pegawai

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Tebo

NO	Indikator	SPM/St andar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Capaian Realisasi			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	2017	2018	2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
1	Persentase Penempatan aparatur sesuai Bazeeting			60 %	65%	65%	75%	108,83%	115,2%	110,83%	75%	
2	Persentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur			35%	40%	50%	60%	113,54%	105,37 %	82,72%	60%	
3	Persentase penanganan kasus disiplin ASN			50%	50%	60%	60%	90%	100%	166,66%	60%	
4	Persentase akurasi data kepegawaian			70%	75%	80%	80%	100%	100%	120,31%	80%	
5	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian			80%	80%	81%	82%	108,75%	107,5%	105,61%	82%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, isu strategis pembangunan Kabupaten Tebo 2017-2022 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *Good Governance* dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan *Good Governance* dan mewujudkan pelayanan prima dibutuhkan Sumber daya Manusia yang berkualitas profesional dan proporsional. Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan sumber daya aparatur di daerah selaku pelayan masyarakat perlu dilakukan perencanaan dan pengelolaan secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan ketrampilan) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dimiliki, akan mampu mewujudkan pelayanan prima di daerah. Dari analisis isu strategis yang menjadi permasalahan di daerah adalah bagaimana kemudahan pelayanan publik baik pelayanan administrasi dan hak masyarakat lainnya dapat terlayani dengan baik. Kemudian dari hasil analisis lingkungan daerah untuk mewujudkan pelayanan publik dan yang menjadi **kekuatan** yaitu tersedianya sumber daya manusia yang memadai.

Analisis yang menjadi **kelemahan** daerah adalah pelayanan pemerintah kepada masyarakat belum memuaskan dan yang menjadikan **peluang** daerah adalah adanya political will secara nasional untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia melalui prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan dan yang menjadi **ancaman** daerah adalah era globalisasi yang harus diikuti sesuai perkembangan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi adalah mengurus administrasi kepegawaian di daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi : perencanaan (formasi), persyaratan

pengangkatan, penempatan dan pemindahan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, sanksi (punishment) dan penghargaan (reward), pensiun. Untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda dan prioritas pembangunan diantaranya mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing, yaitu suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat yang semakin mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan sendiri dan berdaya saing tinggi yang ditandai dengan semakin berkembangnya jiwa **leadership dikalangan pemerintahan** dan semangat entrepreneur dikalangan masyarakat luas, yang selanjutnya diarahkan ke dalam agenda prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tebo. Sebagai konsekwensi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan sumberdaya aparatur yang profesional dan proporsional. Untuk menata sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil Identifikasi Permasalahan tugas pokok fungsi dilakukan melalui analisa SWOT.

Dari identifikasi pemasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi perhatian untuk kedepan dalam pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur melanjutkan program dan kegiatan yang belum tercapai pada target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklanjuti sebagai konsekuensi dalam mendukung program pemerintah.

Secara umum permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing unit kerja.

2. Kurang sarana dan prasarana sistem informasi manajemen kepegawaian yang mampu melayani kebutuhan data dalam pengambilan keputusan.
3. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated, dan berbasis pada kinerja;
4. Pengadaan PNS belum sepenuhnya bisa mengakomodir pada kebutuhan riil;
5. Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi jabatan;
6. Pengembangan pegawai berdasarkan pola karier belum bisa dilaksanakan secara optimal;
7. Sistem penilaian kinerja belum obyektif;
8. Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh seluruh pegawai;
9. Belum sesuai antara kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi aparatur yang tersedia;
10. Penyebaran SDM aparatur belum merata;
11. Masih lemahnya tingkat budaya kerja aparatur, sehingga berpengaruh pada kinerja aparatur khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

a. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis Lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (Opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah :

1. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Tersedianya dana APBD Kabupaten Tebo yang memadai,
3. Adanya komitmen pimpinan.
4. Tersedianya jaringan SAPK.
5. Peningkatan kesejahteraan pegawai.

Tantangan (threats) yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

1. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance.
2. Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kulaitas prima dan kinerja organisasi publik.
3. Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN
4. Perkembangan birokrasi yang menghendaki aparatur yang bebas dari KKN.
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
6. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai.

b. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis lingkungan internal dikelompokkan atas hal – hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Adapun kelemahan – kelemahan yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan kepada customer (pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo)

2. Kurangnya perencanaan, evaluasi/ monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan kepegawaian.
3. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran.
4. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai dalam penerapan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian.
5. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi.
6. Belum memiliki SPM untuk kegiatan bidang kepegawaian.

Sedangkan kekuatan – kekuatan yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diantaranya :

1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya.
2. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
3. Adanya skala prioritas program kerja.
4. Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan – kegiatan di bidang kepegawaian.
5. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan.
6. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian.
7. Profesionalisme pegawai.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana kerja (Renja) BKPSDM tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang seharusnya telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (renstra) BKPSDM. Renja Tahun 2020 ini di susun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2020. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BKPSDM Kabupaten Tebo.

Penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas BKPSDM Kabupaten Tebo yang tercantum di dalam Rancangan Awal RKPD 2020;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;

4. Memastikan bahwa program/kegiatan di BKPSDM Kabupaten Tebo yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2020;
5. Mengidentifikasi jenis program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Membuat rumusan kebutuhan program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2020 yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
7. Mengidentifikasi program/kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Proses penelaahan dan review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan tujuan agar program/kegiatan yang disusun oleh BKPSDM Kabupaten Tebo selaras dengan rencana program/kegiatan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2020. Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah dimana terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD. Adapun perbedaannya terletak pada besaran anggaran, indikator kinerja dan target capaian beberapa kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKPSDM	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	527.918.200	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKPSDM	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100%	776.580.000	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	BKPSDM	Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000	27,000,000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	BKPSDM	Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran Jumlah periode pembayaran tenaga kontrak bagian administrasi (1 orang)	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000 12 bln	27,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	jumlah periode pembayaran jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 bln	71,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	jumlah periode pembayaran jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 bln	71,000,000	

	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	BKPSDM	Jumlah periode pembayaran Asuransi pegawai tidak tetap (6 orang)	12 bln	1,000,000	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	BKPSDM	Jumlah periode pembayaran Asuransi pegawai tidak tetap (6 orang)	12 bln	1,000,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan pajaknya	20 unit	7.780.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan pajaknya	20 unit	7.780.000	
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	BKPSDM	jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar asuransinya	4	27,000,000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	BKPSDM	jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar asuransinya	4	27,000,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKPSDM	Jumlah periode pembayaran honor Aparatur pengelola adm. Keuangan	12 bln	72.150.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKPSDM	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	12 bln	72.150.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BKPSDM	jumlah tersedianya alat kebersihan kantor	4paket	39.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BKPSDM	Tersedianya Peralatan Kebersihan jumlah pembayaran honor pegawai kebersihan (2 orang)	4paket 12 bulan	39,000,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKPSDM	Jumlah Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	12 bln	65,000,000	Jumlah Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	BKPSDM	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	65,000,000	

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	jumlah periode Tersedianya barang cetak, kop surat BKPSDM, Setda, Bupati Kab. Tebo	12 bln	47,850,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	jumlah periode Tersedianya barang cetak, kop surat BKPSDM, Setda, Bupati Kab. Tebo	12 bln	47,850,000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKPSDM	jumlah tersedianya komponen instalasi listrik kantor	4 paket	7,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKPSDM	tersedianya komponen instalasi listrik kantor	4 paket	7,000,000	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BKPSDM	Jumlah tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	0	00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	BKPSDM	Jumlah periode tersedianya bahan bacaan bagi pegawai	12 bln	20,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	BKPSDM	Jumlah periode tersedianya bahan bacaan bagi pegawai	12 bln	20,000,000	
Penyediaan Makan dan Minum	BKPSDM	jumlah periode terpenuhinya makan dan minuman kegiatan dan tamu	12 bln	13,500,000	Penyediaan Makan dan Minum	BKPSDM	jumlah periode terpenuhinya makan dan minuman kegiatan dan tamu	12 bln	20,000,000	
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	BKPSDM	jumlah periode pelaksanaan rapat-rapat ke luar daerah	12 bln	129,638.200	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	BKPSDM	jumlah periode pelaksanaan rapat-rapat ke luar daerah	12 bln	129,638,200	

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKPSDM	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	200.965.008	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKPSDM	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	200.965.008	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	BKPSDM	Jumlah paket rehab gedung	0	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BKPSDM	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	0	
	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas operasional	BKPSDM	Jumlah Kendaraan roda dua dan empat yang rutin dipelihara	roda 2 16 unit roda 4 4 unit	136.965,008	Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas operasional	BKPSDM	Jumlah Kendaraan roda dua dan empat yang rutin dipelihara	roda 2 16 unit roda 4 4 unit	136.965,008	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BKPSDM	Jumlah periode terpeliharanya peralatan kerja kantor	12 bln	64,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BKPSDM	Jumlah periode terpeliharanya peralatan kerja kantor Jumlah periode pembayaran tenaga honor penjaga malam (2 Orang)	12 bulan 12 bulan	64,000,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BKPSDM	Persentase Disiplin Aparatur	100%	26,400,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BKPSDM	Persentase Disiplin Aparatur	100%	26,400,000	

	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	BKPSDM	Tersedianya pakaian batik dan olah raga	40 stel	26,400,000	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	BKPSDM	Tersedianya pakaian batik dan olah raga	40 stel	26,400,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	BKPSDM	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang memenuhi standar kompetensi	100%	100.072.468	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	BKPSDM	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang memenuhi standar kompetensi	100%	100.072.468	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	BKPSDM	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	10	81,650,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	BKPSDM	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	10	81,650,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	BKPSDM	Jumlah Peserta Diklat	0	18,422,468	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS	BKPSDM	Jumlah Peserta Diklat	0	18,422,468	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BKPSDM	Jumlah Penyelenggaraan pameran investasi	0	0	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BKPSDM	Jumlah Penyelenggaraan pameran investasi	0	0	
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	BKPSDM	Jumlah Pelaksanaan pameran pembangunan Kab. Tebo	0	0	Penyelenggaraan Pameran Investasi	BKPSDM	Jumlah Pelaksanaan pameran pembangunan Kab. Tebo	0	0	

	Program Pendidikan kedinasan	BKPSDM	Jumlah aparatur peserta pendidikan kedinasan	0	23.879.091	Program Pendidikan kedinasan	BKPSDM	Jumlah aparatur peserta pendidikan kedinasan	0	23.879.091	
	Pendidikan Penjurangan Struktural	BKPSDM	Jumlah aparatur peserta diklat penjurangan struktural	0	23.879.091	Pendidikan Penjurangan Struktural	BKPSDM	Jumlah aparatur peserta diklat penjurangan struktural	0	23.879.091	
	Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPSDM	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		1.815.821.438	Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPSDM	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		1.815.821.438	
	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	BKPSDM	Jumlah pejabat yang lolos mengikuti uji kompetensi	6	612,301,050	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	BKPSDM	Jumlah pejabat yang lolos mengikuti uji kompetensi	6	612,301,050	
	Seleksi Penerimaan Calon ASN	BKPSDM	Jumlah Penerimaan CPNS sesuai formasi..	195	673.756.471	Seleksi Penerimaan Calon ASN	BKPSDM	Jumlah Penerimaan CPNS sesuai formasi..		673.756.471	
	Penempatan PNS	BKPSDM	Jumlah penempatan CPNS/PNS pada OPD sesuai formasi.	165	14.502.600	Penempatan PNS	BKPSDM	Jumlah penempatan CPNS/PNS pada OPD sesuai formasi.	250	14.502.600	

	Penataan sistem administrasi kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengusulan dan penerbitan SK kenaikan pangkat ASN	550	90.813.900	Penataan sistem administrasi kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengusulan dan penerbitan SK kenaikan pangkat PNS	850	90.813.900	
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah penerapan peraturan disiplin bagi ASN yang melakukan pelanggaran.	9	37.633.700	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah penerapan peraturan disiplin bagi ASN yang melakukan pelanggaran.	9	37.633.700	
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	BKPSDM	Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar ikatan dinas	3	186.671.671.54 9	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	BKPSDM	Jumlah aparatur penerima bantuan tugas belajar	3	186.671.671.54 9	
	Validasi/ Status Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Persentase kelengkapan data base aparatur	85%	23.987.000	Validasi/ Status Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Persentase kelengkapan data base aparatur	85%	23.987.000	
	Penyusunan Formasi dan Penataan ASN	BKPSDM	Jumlah penyelesaian dokumen kepegawaian	1	28.304.668	Penyusunan Formasi dan Penataan ASN	BKPSDM	Jumlah penyelesaian dokumen kepegawaian	1	28.304.668	
	Penilaian Kinerja SDM Aparatur	BKPSDM	Jumlah Penilaian Kinerja Aparatur	4000	19.446.800	Penilaian Kinerja SDM Aparatur	BKPSDM	Jumlah Penilaian Kinerja Aparatur	4000	19.446.800	

	Pengelolaan administrasi taspen, cuti bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	BKPSDM	Jumlah Dokumen Taspen, Cuti, Bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	543	20.503.700	Pengelolaan administrasi taspen, cuti bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	BKPSDM	Jumlah Dokumen Taspen, Cuti, Bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	543	20.503.700	
	Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAPK	BKPSDM	Persentase Pemeliharaan SAPK	100%	77.600.000	Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAPK	BKPSDM	Persentase Pemeliharaan SAPK	100%	77.600.000	
	Rapat Kerja Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah peserta Rapat Kerja Kepegawaian	0	00	Rapat Kerja Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah peserta Rapat Kerja Kepegawaian	0	00	
	Pengelolaan administrasi kartu identitas pegawai	BKPSDM	Jumlah Kartu Identitas Pegawai	200	11,300,000	Pengelolaan administrasi kartu identitas pegawai	BKPSDM	Jumlah Kartu Identitas Pegawai	200	11,300,000	
	Penanganan kasus-kasus perceraian PNS	BKPSDM	Jumlah Penanganan kasus perceraian	12	13,000,000	Penanganan kasus-kasus perceraian PNS	BKPSDM	Jumlah Penanganan kasus perceraian	12	13,000,000	
	Pelantikan sumpah dan janji PNS	BKPSDM	Jumlah PNS yang mengikuti sumpah janji PNS	165	6,000,000	Pelantikan sumpah dan janji PNS	BKPSDM	Jumlah PNS yang mengikuti sumpah janji PNS	165	6,000,000	

	Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi Korpri	BKPSDM	Jumlah Kegiatan Organisasi Korpri	0	000	Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi Korpri	BKPSDM	Jumlah Kegiatan Organisasi Korpri	0	0	
	Pekan Olahraga Korpri tingkat Provinsi	BKPSDM	Terlaksananya pekan olah raga korpri tingkat provinsi	0	00	Pekan Olahraga Korpri tingkat Provinsi	BKPSDM	Terlaksananya pekan olah raga korpri tingkat provinsi	0	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2020 didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten. Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BKPSDM Kabupaten Tebo selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo. Hal ini berarti, Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2020 murni berisi program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan Renstra BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Tebo

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah memiliki agenda pembangunan diantaranya adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dengan prioritas pembangunan nasional antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola. Dari visi misi dan agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten tebo adalah melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada *pembangunan Manajemen Sumberdaya Aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah* untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan aparatur yang professional dan proporsional.

Penajaman program dan kegiatan strategis dalam Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2017-2022, mencakup: Pengembangan sistem manajemen kepegawaian, Penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan kepegawaian, Pembangunan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi dan mutasi kepegawaian, Penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian, melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian, serta kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal Badan Kepegawaian Negara.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Perumusan tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Tebo diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Tebo mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis kepegawaian daerah untuk mendukung Misi III dari RPJMD Kabupaten Tebo periode 2017-2022 yaitu: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)**. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja BKPSDM Kabupaten Tebo Tahun 2020 merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tebo.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan SDM aparatur yang profesional	Indek Profesionalitas ASN	Meningkatnya ASN yang berkompeten dan profesional	Persentase Penempatan aparatur sesuai Bazeeting
				Persentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur
				Persentase penanganan kasus disiplin ASN
		Indek Kepuasan Aparatur	Meningkatnya kinerja pelayanan kepegawaian	Persentase akurasi data kepegawaian
				Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo, maka program kegiatannya di dasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BKPSDM, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Tebo.

Selanjutnya program disusun menurut urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 yaitu terdiri dari program OPD dan Urusan wajib sebagai berikut :

1. Pelayanan Adminstrasi Perkantoran,
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Pendidikan Kedinasan
8. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
9. Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi KORPRI
10. Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi dan Hukum Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan dan Perda

BKPSDM Kabupaten Tebo bukan merupakan instansi teknis tetapi sebagai instansi kepegawaian sehingga hampir semua lokasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan di BKPSDM.

Adapun kegiatan prioritas yang ada di BKPSDM pada tahun 2020 antara lain :

Tabel 3.1
Program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Tebo

Program	Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Program Pendidikan Kedinasan	1. Pendidikan Penjenjangan Struktural
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 2. Seleksi Penerimaan Calon ASN 3. Penempatan PNS 4. Penataan sistem kenaikan pangkat Otomatis PNS 5. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin 6. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 7. Validasi/ Status Kepegawaian Daerah 8. Penyusunan Formasi dan Penataan PNS 9. Penilaian Kinerja SDM Aparatur 10. Pengelolaan administrasi taspen, cuti bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P 11. Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAPK 12. Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAIPKD 13. Rapat Kerja Kepegawaian 14. Pengelolaan administrasi kartu identitas pegawai 15. Penanganan kasus-kasus perceraian PNS 16. Pelantikan sumpah dan janji PNS

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 serta Perkiraan Maju Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2020 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2020 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rencana program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran atau untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tebo Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

KODE	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran			527.918.200			826,580,000
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Input Output Outcome Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	BKPSDM	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000	27,000,000	BKPSDM	400 lembar materai 6000 dan 200 materai 3000	27,000,000

	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Input Output Outcome	jumlah periode pembayaran jasa Komunikasi, Air dan Listrik Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik	BKPSDM	12 bulan	71,000,000	BKPSDM	12 bulan	71,000,000
	3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Input Output Outcome	Jumlah periode pembayaran Asuransi pegawai tidak tetap (6 orang) Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik	BKPSDM	12 bulan	1,000,000	BKPSDM	12 bulan	1,000,000
	4. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.	Input Output Outcome	jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar asuransinya Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik	BKPSDM	4 unit	27,000,000	BKPSDM	4	27,000,000
	5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Input Output Outcome	Jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik	BKPSDM	20 unit	7,780,000	BKPSDM	20 unit	7,780,000
	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Input Output Outcome	Jumlah periode pembayaran honor Aparatur pengelola adm. Keuangan Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik	BKPSDM	12 bulan	72.150,000	BKPSDM	12 bulan	116.800.000

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input							
	Output	jumlah tersedianya alat kebersihan kantor	BKPSDM	4 paket	39,000,000	BKPSDM	4 paket	39,000,000
	Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik						
7. Penyediaan alat tulis kantor	Input							
	Output	Jumlah Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	BKPSDM	2 paket	65,000,000	BKPSDM	2 paket	70,000,000
	Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan baik						
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input							
	Output	jumlah periode Tersedianya barang cetak, kop surat BKPSDM, Setda, Bupati Kab. Tebo	BKPSDM	12 bulan	47.850,000	BKPSDM	12 bulan	50,000,000
	Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik						
9. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Input							
	Output	jumlah tersedianya komponen instalasi listrik kantor	BKPSDM	4 paket	7,000,000	BKPSDM	4 paket	7,000,000
	Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik						
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Input							
	Output	Jumlah tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	BKPSDM	0 paket	0	BKPSDM	3 paket	205,000,000

		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik							
	11. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Input								
		Output	Jumlah periode tersedianya bahan bacaan bagi pegawai	BKPSDM	12 bulan	20,000,000	BKPSDM	12 bulan	20,000,000	
		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik							
	12. Penyediaan makanan dan minuman	Input								
		Output	jumlah periode terpenuhinya makan dan minuman kegiatan dan tamu	BKPSDM	12 bulan	13,500,000	BKPSDM	12 bulan	18,000,000	
		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi kantor berjalan dengan baik							
	13. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Input								
		Output	jumlah periode pelaksanaan rapat-rapat ke luar daerah	BKPSDM	12 bulan	129.638,200	BKPSDM	12 bulan	200,000,000	
		Outcome	Pelaksanaan adminstrasi perkantoran berjalan dengan baik							
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur				200.965.008				
	1. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Input								
		Output	Jumlah paket rehab gedung	BKPSDM	1 paket	0	BKPSDM	1 paket	427,501,600	
		Outcome	Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas							

	2. Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas operasional	Input Output Outcome	Jumlah Kendaraan roda dua dan empat yang rutin dipelihara Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas	BKPSDM	roda 2 16 unit, roda 4 4 unit	136,965,008	BKPSDM	roda 2 16 unit, roda 4 4 unit	156,220,000
	3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input Output Outcome	Jumlah periode terpeliharanya peralatan kerja kantor Kemudahan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas	BKPSDM	12 bulan	64,000,000	BKPSDM	12 bulan	49,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur				26,400,000			26,400,000
	1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Input Output Outcome	jumlah tersedianya pakaian olahraga dan baju batik Disiplin pegawai dalam berpakaian	BKPSDM	40 Stell	26,400,000	BKPSDM	40 Stell	26,400,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan sumber daya aparatur yang memenuhi standar kompetensi				100.072.468			1,375,000,000
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	Input Output Outcome	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kinerja ASN	BKPSDM	12 orang	81.650.000	BKPSDM	15 orang	100,000,000

	2. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	Input Output Outcome	Jumlah peserta Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah Meningkatnya Kinerja ASN	BKPSDM	0	18.422.468	BKPSDM	195	2,275,000,000
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi				0			20,000,000
	1. Penyelenggaraan Pameran Investasi	Input Output Outcome	Jumlah Pelaksanaan pameran pembangunan Kab. Tebo Terpenuhinya informasi mengenai dinas	BKPSDM	1 Kali	0	BKPSDM	1 Kali	20,000,000
	Program Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Pendidikan Kedinasan				23.879.091			553,469,000
	1. Pendidikan Penjurangan Struktural	Input Output Outcome	Jumlah aparatur peserta diklat penjurangan struktural Bertambahnya jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk Jabatan Struktural	BKPSDM	0 orang	23.879.091	BKPSDM	15 orang	553,469,000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				1.815.821.438			2,287,280,000
	1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN	Input Output Outcome	Jumlah pengisian jabatan melalui seleksi terbuka Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	6	612,301,050	BKPSDM	10	712,000,000

	2. Seleksi Penerimaan Calon ASN	Input						
		Output	Jumlah Penerimaan CPNS sesuai formasi.	BKPSDM	195	673.756.471	BKPSDM	160
		Outcome	Meningkatnya kinerja ASN					723,200,000
	3. Penempatan ASN	Input						
		Output	Jumlah penempatan CPNS/PNS pada OPD sesuai formasi.	BKPSDM	165	14.502.600	BKPSDM	165
		Outcome	Meningkatnya kinerja ASN					25,000,000
	4. Penataan sistem kenaikan pangkat ASN	Input						
		Output	Jumlah Pengusulan dan penerbitan SK kenaikan pangkat ASN	BKPSDM	550 dokumen	90.813.900	BKPSDM	550 dokumen
		Outcome	Meningkatnya kinerja ASN					159,650,000
	5. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	Input						
		Output	Jumlah penerapan peraturan disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran.	BKPSDM	9	37.633.700	BKPSDM	8
		Outcome	Meningkatnya kinerja ASN					60,000,000
	6. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Input						
		Output	Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar ikatan dinas	BKPSDM	3 orang	186.671.459	BKPSDM	4 orang
		Outcome	Meningkatnya kinerja ASN					220,000,000
	7. Validasi/ Status Kepegawaian Daerah	Input						
		Output	persentase validasi kepegawaian	BKPSDM	100%	23.987.000	BKPSDM	90%
		Outcome	Meningkatnya kinerja ASN					50,000,000

	8. Penyusunan Formasi dan Penataan ASN	Input Output Outcome	Jumlah dokumen formasi yang disusun Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	1 dokumen	28.304.668	BKPSDM	1 dokumen	41,530,000
	9. Penilaian Kinerja SDM Aparatur	Input Output Outcome	Jumlah Penilaian Kinerja Aparatur Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	4000	19.446.800	BKPSDM	4000	30,000,000
	10. Pengelolaan administrasi taspen, cuti bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P	Input Output Outcome	Jumlah Dokumen Taspen, Cuti, Bapertarum, satya lencana, ujian dinas, dan LP2P Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	543	20.503.700	BKPSDM	543	30,000,000
	11. Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan SAPK	Input Output Outcome	Persentase Pemeliharaan SAPK Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	100%	77.600.000	BKPSDM	100%	93,900,000
	12. Rapat Kerja Kepegawaian	Input Output Outcome	Jumlah peserta Rapat Kerja Kepegawaian Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	0	0	BKPSDM	50	80,000,000
	14. Pengelolaan administrasi kartu identitas pegawai	Input Output Outcome	Jumlah Kartu Identitas Pegawai Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	350	11.300,000	BKPSDM	375	21,000,000
	15. Penanganan kasus-kasus perceraian ASN	Input Output Outcome	Jumlah Penanganan kasus perceraian Meningkatnya kinerja ASN	BKPSDM	8	13,000,000	BKPSDM	13	28,000,000

	16. Pelantikan sumpah dan janji ASN	Input						
		Output	Jumlah PNS yang mengikuti sumpah janji ASN	BKPSDM	165	6,000,000	BKPSDM	250
		Outcome	Meningkatnya kinerja ASN					13,000,000
	Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi Korpri					0		84,125,000
	<i>1. Pekan Olahraga Korpri Tingkat Provinsi</i>	Input						
		Output	Terkirimnya atlet mengikuti pekan olah raga korpri tingkat provinsi jambi	BKPSDM	0 Kali	0	BKPSDM	1 Tahun
		Outcome	Meningkatnya kapasitas organisasi Korpri					84,125,000
	JUMLAH	2.695.056.205						

BAB V

PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2020 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kebutuhan OPD.

Pada tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 8 program. Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja OPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kabupaten Tebo. Renja Tahun 2020 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo untuk Tahun Anggaran 2020. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2017-2022.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2020 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan

senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BKPSDM Kabupaten Tebo tahun 2020, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mewujudkan good governance di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

Muara Tebo, 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEBO,**



**HARYADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 199002 1 001**